

Literasi Informasi dan Kearsipan Pegawai Non-Arsiparis sebagai Fondasi Tata Kelola Arsip di Era Society 5.0

Primus Sanbein^{1*}

¹Graduate School of IPB University

*Corresponding author. Email: primsanbein@gmail.com

ABSTRACT

Digital transformation in the Society 5.0 era has shifted information and archival management from conventional administrative activities toward strategic practices integrated with digital systems and institutional governance. In many organizations, particularly public institutions and higher education, records management is no longer performed exclusively by professional archivists; non-archivist personnel are increasingly involved in the creation, management, and use of records as part of daily work routines. This situation presents critical challenges related to information and archival literacy, especially amid the limited availability of archivists and the growing complexity of digital information systems. Insufficient literacy may undermine records reliability, institutional accountability, and the long-term sustainability of organizational memory. This article aims to develop a conceptual understanding of strengthening information and archival literacy among non-archivist personnel as a foundation for sustainable and adaptive records governance. Using a Conceptual Literature Review with thematic synthesis of key literature, this study proposes a sustainable information and archival literacy model that positions literacy as a strategic capability for supporting effective records governance in the Society 5.0 era.

Keywords: *information literacy; archival literacy; non-archivist personnel; records governance; Society 5.0*

ABSTRAK

Transformasi digital pada era Society 5.0 telah menggeser pengelolaan informasi dan kearsipan dari aktivitas administratif konvensional menjadi praktik strategis yang terintegrasi dengan sistem digital dan tata kelola institusional. Dalam institusi publik dan pendidikan tinggi, pengelolaan arsip tidak lagi sepenuhnya dijalankan oleh arsiparis profesional, melainkan melibatkan pegawai non-arsiparis yang berperan langsung dalam penciptaan dan pemanfaatan arsip. Kondisi ini memunculkan tantangan literasi informasi dan kearsipan di tengah keterbatasan arsiparis serta meningkatnya kompleksitas sistem informasi digital. Artikel ini bertujuan mengembangkan pemahaman konseptual mengenai penguatan literasi informasi dan kearsipan pada pegawai non-arsiparis sebagai fondasi tata kelola arsip yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Conceptual Literature Review melalui sintesis tematik literatur kunci. Hasil kajian menghasilkan model literasi informasi dan kearsipan berkelanjutan yang menempatkan literasi sebagai kapabilitas strategis untuk mendukung akuntabilitas, keberlanjutan arsip, dan tata kelola informasi institusional di era Society 5.0.

Kata kunci: literasi informasi; literasi kearsipan; pegawai non-arsiparis; tata kelola arsip; *Society 5.0*



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2018 by author.

PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat global yang memasuki era *Society 5.0* menandai pergeseran paradigma pembangunan dari orientasi teknologi menuju pendekatan yang berpusat pada manusia. Dalam kerangka ini, teknologi tidak lagi diposisikan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup, efektivitas layanan publik, dan keberlanjutan institusi sosial. Konsep *Society 5.0* menekankan integrasi antara ruang fisik dan digital yang memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data, kolaborasi lintas aktor, serta penguatan kapasitas manusia sebagai subjek utama transformasi. Dalam konteks tersebut, berbagai institusi publik dan organisasi sosial berada pada posisi strategis dalam merespons tuntutan transformasi yang menekankan keseimbangan antara inovasi teknologi, kapasitas manusia, dan tata kelola institusional (Rojas et al., 2021).

Sejumlah kajian menunjukkan bahwa implementasi *Society 5.0* dalam berbagai institusi dan organisasi tidak hanya berkaitan dengan adopsi teknologi canggih, tetapi juga menuntut perubahan mendasar dalam tata kelola, budaya organisasi, dan kompetensi sumber daya manusia. Organisasi di masa depan dituntut untuk mengembangkan model tata kelola yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis pengetahuan guna merespons kompleksitas tantangan sosial dan digital. Dalam kerangka ini, transformasi digital dipahami sebagai proses sosioteknis yang menempatkan manusia, nilai, dan praktik kerja sebagai elemen kunci, bukan sekadar modernisasi sistem atau infrastruktur (Carayannis & Morawska-Jancelewicz, 2022).

Pendekatan transformasi digital yang berpusat pada manusia juga menegaskan bahwa keberhasilan inovasi teknologi sangat dipengaruhi oleh kesiapan aktor organisasi, kapasitas pembelajaran, serta kemampuan individu dan kelompok dalam memaknai dan menggunakan teknologi secara kontekstual. Transformasi digital yang mengabaikan dimensi manusia berpotensi menghasilkan sistem yang tidak berkelanjutan, kurang dimanfaatkan, atau bahkan menimbulkan resistensi dalam praktik kerja sehari-hari. Oleh karena itu, penguatan kapabilitas manusia menjadi prasyarat penting untuk memastikan bahwa inovasi digital benar-benar mendukung tujuan organisasi dan kebutuhan pengguna (Akman & Erdirencelebi, 2024).

Dalam kerangka tata kelola organisasi di masyarakat digital, kompetensi dan keterampilan aktor dipandang sebagai fondasi utama governance yang efektif. Tata kelola di era digital tidak hanya bergantung pada regulasi dan struktur formal, tetapi juga pada kapasitas aktor dalam mengelola informasi, menafsirkan data, serta mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Perspektif ini relevan untuk melihat pengelolaan arsip sebagai bagian integral dari tata kelola informasi institusional, di mana kualitas pengelolaan arsip mencerminkan kemampuan organisasi dalam menjaga memori, akuntabilitas, dan kontinuitas pengetahuan (Micheli et al., 2020).

Di Indonesia, pengelolaan arsip memiliki landasan regulatif yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang menegaskan arsip sebagai bukti akuntabilitas dan memori kolektif bangsa, serta menempatkan pengelolaan arsip sebagai tanggung jawab seluruh lembaga negara dan organisasi publik. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pengelolaan arsip di berbagai institusi sering kali menghadapi tantangan struktural dan keterbatasan sumber daya manusia. Pengelolaan arsip tidak selalu ditangani oleh arsiparis, melainkan dijalankan oleh pegawai non-arsiparis yang memiliki tugas utama di bidang administrasi, layanan kelembagaan, atau fungsi kerja lainnya. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara kerangka normatif kearsipan dan realitas operasional di tingkat institusi (Republik Indonesia, 2009).

Dalam kerangka regulatif dan realitas operasional tersebut, pegawai pengelola kearsipan secara faktual terdiri atas dua kelompok utama, yaitu arsiparis dan pegawai non-arsiparis. Arsiparis merupakan pejabat fungsional yang memiliki kompetensi, kewenangan, dan tanggung jawab profesional dalam pengelolaan arsip sesuai kaidah kearsipan. Sementara itu, pegawai non-arsiparis adalah pegawai yang bukan menduduki jabatan arsiparis, tetapi dalam praktiknya menjalankan fungsi pengelolaan arsip sebagai bagian dari tugas kerja institusional sehari-hari. Data kearsipan nasional menunjukkan bahwa jumlah pegawai non-arsiparis yang terlibat langsung dalam pengelolaan arsip jauh melampaui jumlah arsiparis, sehingga pengelolaan arsip institusional secara operasional sangat bergantung pada kapasitas kelompok ini. Kondisi tersebut menegaskan bahwa kualitas tata kelola arsip tidak hanya ditentukan oleh keberadaan arsiparis, tetapi juga oleh kapabilitas literasi informasi dan kearsipan pegawai non-arsiparis di tingkat operasional.

Berangkat dari kondisi tersebut, isu literasi informasi dan kearsipan menjadi semakin penting untuk dikaji. Dalam lingkungan *Society 5.0*, literasi tidak lagi dipahami sebagai keterampilan teknis semata,

melainkan sebagai kapabilitas strategis yang memungkinkan aktor organisasi memahami, mengelola, dan memanfaatkan informasi serta arsip secara bermakna dalam praktik kerja institusional. Ketergantungan yang tinggi terhadap pegawai non-arsiparis menjadikan literasi informasi dan kearsipan sebagai fondasi penting bagi tata kelola arsip yang berkelanjutan di berbagai institusi publik dan organisasi. Dengan mengkaji peran, kapabilitas, dan ketimpangan yang melekat pada praktik pengelolaan arsip oleh pegawai non-arsiparis, artikel ini berupaya memberikan dasar konseptual bagi pengembangan model literasi berkelanjutan yang relevan dengan tuntutan *Society 5.0* dan dinamika kelembagaan secara lebih luas.

METODE

Artikel ini disusun menggunakan pendekatan *Conceptual Literature Review* (CLR) yang bertujuan mengembangkan pemahaman konseptual dan kerangka pemikiran teoretis mengenai penguatan literasi informasi dan kearsipan pada pegawai non-arsiparis di tengah transformasi digital dan tuntutan *Society 5.0*. Pendekatan ini dipilih karena CLR memungkinkan integrasi gagasan teoretis lintas literatur untuk membangun sintesis konseptual dan model pemikiran, bukan untuk menguji hubungan kausal atau menghasilkan temuan empiris (Torraco, 2016).

Penulisan artikel mengikuti prinsip CLR yang menekankan analisis kritis terhadap literatur, pengorganisasian gagasan ke dalam tema-tema konseptual, serta sintesis lintas tema untuk menghasilkan kerangka pemikiran baru. Literatur diperlakukan sebagai sumber argumen teoretis untuk menjelaskan fenomena, mengidentifikasi celah konseptual, dan membangun pemahaman integratif mengenai peran literasi dalam tata kelola arsip institusional, dengan penekanan pada relevansi substantif dan kedalaman kontribusi konseptual, bukan pada kuantifikasi publikasi (Snyder, 2019).

Pencarian literatur dilakukan melalui basis data akademik dan jurnal bereputasi, meliputi Google Scholar, Scopus, serta portal jurnal nasional, menggunakan kombinasi kata kunci seperti *information literacy*, *archival literacy*, *records management*, *non-archivist personnel*, *digital transformation*, dan *Society 5.0*. Literatur yang dianalisis dipilih berdasarkan kesesuaian topik dengan fokus kajian, kejelasan argumentasi teoretis, serta kontribusinya dalam menjelaskan dinamika literasi dan pengelolaan arsip dalam konteks institusional. Publikasi difokuskan pada periode 2015–2025 untuk merepresentasikan perkembangan pemikiran kontemporer, dengan penyertaan terbatas karya seminal pra-2015 sebagai landasan teoretis yang masih relevan.

Analisis dilakukan melalui pembacaan kritis dan pengelompokan gagasan ke dalam tema-tema konseptual utama, yang selanjutnya dianalisis secara integratif untuk mengidentifikasi relasi antarkonsep dan pola argumentasi yang konsisten. Proses sintesis lintas tema menghasilkan perumusan model literasi informasi dan kearsipan berkelanjutan yang menjelaskan keterkaitan antara peran pegawai non-arsiparis, kapabilitas literasi, dan konteks struktural kelembagaan sebagai kontribusi konseptual utama artikel dalam memahami tata kelola arsip institusional di era *Society 5.0*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pegawai Non-Arsiparis dalam Pengelolaan Arsip

Pengelolaan arsip dalam organisasi modern semakin menunjukkan pergeseran aktor yang terlibat secara langsung dalam praktik kearsipan. Dalam banyak konteks institusional, arsip tidak lagi sepenuhnya dikelola oleh arsiparis, melainkan oleh pegawai non-arsiparis yang menjalankan tugas utama di bidang administrasi, layanan kelembagaan, atau fungsi kerja lainnya. Fenomena ini menggambarkan kondisi *archives without archivists*, yaitu situasi ketika fungsi kearsipan dijalankan oleh aktor yang tidak memiliki latar belakang profesional kearsipan, namun memegang peran penting dalam menjaga keberlangsungan memori dan akuntabilitas organisasi. Kondisi tersebut bukan anomali, melainkan respons praktis terhadap keterbatasan sumber daya dan meningkatnya volume arsip dalam organisasi yang terdigitalisasi (Tansey, 2015).

Pergeseran peran tersebut tidak dapat dilepaskan dari dinamika perubahan organisasi dan perkembangan teknologi informasi. Digitalisasi dokumen, sistem administrasi elektronik, dan platform kerja berbasis jaringan telah memperluas akses serta distribusi tanggung jawab pengelolaan arsip ke berbagai unit kerja. Proses digitalisasi arsip kerap dirancang untuk memudahkan pengguna non-profesional, sehingga mendorong keterlibatan pegawai non-arsiparis dalam aktivitas penciptaan, penyimpanan, dan temu kembali arsip. Di satu sisi, kondisi ini meningkatkan efisiensi kerja dan

mempercepat alur layanan; namun di sisi lain, ia juga memunculkan tantangan serius terkait konsistensi praktik, kepatuhan terhadap prinsip kearsipan, serta keberlanjutan arsip digital dalam jangka panjang (Torres, 2018).

Kajian mengenai penggunaan arsip di lingkungan organisasi telah lama menegaskan bahwa arsip tidak hanya dimanfaatkan oleh peneliti atau pihak eksternal, tetapi juga oleh aktor internal yang terlibat dalam fungsi administratif dan manajerial. Dalam praktik organisasi, penggunaan arsip oleh aktor internal tersebut umumnya bersifat pragmatis, berorientasi pada kelancaran kerja, pemenuhan kewajiban institusional, dan dukungan terhadap proses pengambilan keputusan. Perspektif ini penting karena menunjukkan bahwa pegawai non-arsiparis tidak hanya berperan sebagai pengguna arsip, tetapi juga sebagai pengelola arsip dalam praktik kerja sehari-hari. Dengan demikian, pegawai non-arsiparis bukan sekadar pengguna pasif, melainkan aktor aktif yang membentuk cara arsip diciptakan, diklasifikasikan, dan dimanfaatkan dalam konteks operasional organisasi sehari-hari (Yakel & Bost, 1994).

Pendekatan yang lebih mutakhir menekankan pentingnya memahami pengelolaan arsip dari sudut pandang praktik aktual dan pengalaman pengguna. Persepsi, kebiasaan kerja, serta konteks organisasi terbukti sangat memengaruhi bagaimana arsip diperlakukan dan digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Dalam kerangka ini, peran pegawai non-arsiparis tidak dapat dipahami semata-mata sebagai “pengganti” arsiparis, melainkan sebagai bagian dari ekosistem kearsipan yang kompleks yang melibatkan beragam aktor dengan tingkat otoritas, tanggung jawab, dan kompetensi yang berbeda-beda, yang secara kolektif menentukan kualitas pengelolaan arsip institusional (Hellmer, 2023).

Temuan empiris dalam konteks organisasi publik dan pendidikan semakin memperkuat gambaran tersebut. Pegawai administrasi sering menjalankan fungsi pengelolaan arsip sebagai bagian dari tugas rutin untuk mendukung proses layanan dan promosi jabatan. Pengelolaan arsip dalam praktik ini cenderung bersifat instrumental dan jangka pendek, diarahkan untuk memenuhi kebutuhan administratif segera. Akibatnya, arsip kerap diposisikan sebagai produk sampingan dari proses kerja, bukan sebagai aset strategis yang memerlukan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi berkelanjutan (Sumarti, 2023).

Dari perspektif sumber daya manusia, keterlibatan pegawai non-arsiparis dalam pengelolaan arsip mencerminkan ketimpangan kapasitas dan ketersediaan arsiparis di banyak institusi. Keterbatasan jumlah arsiparis mendorong organisasi mendistribusikan tugas kearsipan kepada pegawai lain tanpa diiringi dukungan pelatihan dan pengembangan kompetensi yang memadai. Kondisi ini berimplikasi pada meningkatnya beban kerja, potensi inkonsistensi praktik, serta risiko hilangnya arsip yang bernilai strategis bagi organisasi. Dalam jangka panjang, ketergantungan yang berlebihan pada pegawai non-arsiparis tanpa kerangka dukungan yang jelas dapat melemahkan tata kelola arsip institusional (Netshakhuma, 2020).

Perubahan peran pegawai non-arsiparis juga perlu dipahami dalam konteks evolusi profesi kearsipan itu sendiri. Peran arsiparis telah berkembang dari fungsi preservasi semata menuju peran yang lebih strategis, kolaboratif, dan berorientasi layanan. Perkembangan ini membuka ruang bagi keterlibatan pegawai non-arsiparis dalam praktik kearsipan, namun sekaligus menuntut kejelasan pembagian peran dan tanggung jawab agar tata kelola arsip tetap terjaga. Dengan demikian, pembahasan mengenai peran pegawai non-arsiparis tidak hanya menyoroti realitas praktik pengelolaan arsip, tetapi juga menjadi pijakan penting untuk memahami kebutuhan kapabilitas dan penguatan peran manusia yang akan dibahas pada tema berikutnya (Vassilakaki & Moniarou-Papaconstantinou, 2017).

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa keterlibatan pegawai non-arsiparis dalam pengelolaan arsip merupakan fenomena struktural yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika kerja organisasi modern. Pengelolaan arsip berlangsung sebagai bagian inheren dari praktik administratif sehari-hari, dibentuk oleh keterbatasan sumber daya profesional, kompleksitas sistem digital, dan tuntutan operasional institusi. Dalam konteks tersebut, pegawai non-arsiparis menempati posisi strategis sebagai aktor yang secara langsung memengaruhi kualitas tata kelola arsip sejak tahap penciptaan. Kondisi ini menegaskan perlunya kapabilitas yang mampu menjembatani praktik kerja, prinsip kearsipan, dan akuntabilitas institusional, yang menjadi dasar pembahasan pada tema berikutnya.

Literasi Sebagai Kapabilitas Strategis

Literasi informasi dalam konteks organisasi kontemporer tidak lagi dapat dipahami sebagai sekadar kemampuan teknis untuk mengakses dan menggunakan informasi. Dalam lingkungan kerja yang semakin kompleks dan terdigitalisasi, literasi mencakup kapasitas memahami konteks institusional, menafsirkan makna informasi, serta mengambil keputusan yang bertanggung jawab berdasarkan pemahaman tersebut.

Literasi dipahami sebagai praktik sosial yang terwujud melalui interaksi antara individu, informasi, dan lingkungan kerja, sehingga tidak bersifat statis atau semata-mata melekat pada individu, melainkan dibentuk dan digunakan dalam praktik organisasi sehari-hari (Lloyd, 2012).

Pendekatan literasi sebagai praktik sosial memberikan dasar konseptual untuk memahami peran literasi dalam tata kelola informasi institusional. Dalam kerangka ini, literasi berfungsi sebagai kapabilitas strategis yang memungkinkan aktor organisasi menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara efektif. Literasi selalu berada dalam relasi dengan struktur kekuasaan, kebijakan, dan kepentingan organisasi, sehingga mengandung dimensi reflektif dan kritis yang membantu individu memahami bagaimana informasi diproduksi, disirkulasikan, dan dipertanggungjawabkan dalam konteks kelembagaan (Cuevas-Cerveró et al., 2023).

Dalam ranah kearsipan, literasi informasi berkembang menjadi literasi kearsipan yang berfokus pada pemahaman arsip sebagai sumber daya institusional yang memiliki nilai administratif, hukum, dan historis. Literasi kearsipan mencakup kemampuan memahami konteks penciptaan arsip, prinsip pengelolaan, serta implikasi penggunaan arsip dalam proses pengambilan keputusan. Kapabilitas ini menjadi semakin relevan ketika pengelolaan arsip tidak hanya dilakukan oleh arsiparis, tetapi juga oleh pegawai non-arsiparis yang terlibat langsung dalam proses administrasi dan layanan organisasi (Carini, 2015).

Sejumlah kajian empiris menunjukkan bahwa penguatan literasi kearsipan berdampak pada kualitas interaksi pengguna dengan arsip. Literasi memungkinkan pengguna memahami nilai dan batasan arsip, sekaligus mengurangi hambatan akses dan kesalahan penggunaan. Meskipun banyak kajian dilakukan dalam konteks koleksi khusus, temuan tersebut relevan bagi organisasi secara umum karena menunjukkan bahwa literasi berperan dalam menjembatani kesenjangan antara sistem kearsipan formal dan praktik penggunaan arsip oleh pegawai non-arsiparis yang berperan sebagai pengguna sekaligus pengelola arsip dalam praktik kerja sehari-hari (Baines, 2023).

Literasi kearsipan juga berkaitan erat dengan kompetensi pengguna arsip dalam lingkungan kerja. Kemampuan memahami struktur arsip, konteks penciptaan, dan mekanisme temu kembali menjadi faktor penting dalam pemanfaatan arsip secara efektif. Dalam praktik organisasi, keterbatasan kompetensi ini sering kali menyebabkan arsip diperlakukan secara instrumental dan jangka pendek, sehingga mengabaikan nilai strategis arsip sebagai memori institusional. Dalam konteks ini, literasi berfungsi sebagai kapabilitas yang menghubungkan kebutuhan operasional dengan tanggung jawab jangka panjang organisasi (Vilar et al., 2016).

Dalam konteks yang lebih luas, literasi informasi dan kearsipan tidak dapat dipisahkan dari dimensi motivasional dan perilaku aktor organisasi. Praktik pencatatan dan pengelolaan arsip dipengaruhi oleh faktor personal, pengalaman, serta tingkat literasi recordkeeping individu. Hal ini menunjukkan bahwa literasi tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan, tetapi juga dengan kesiapan dan kemauan aktor untuk menjalankan praktik kearsipan secara konsisten dan bertanggung jawab, sehingga menjembatani pengetahuan, sikap, dan praktik kerja (Frings-Hessami, 2024).

Selain itu, literasi sebagai kapabilitas strategis juga memiliki dimensi keberlanjutan budaya dan institusional. Pemahaman yang bermakna terhadap sumber informasi dan arsip berperan dalam menjaga kesinambungan praktik, nilai, dan memori kolektif organisasi. Dalam konteks ini, literasi informasi dan kearsipan tidak hanya mendukung efisiensi kerja, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan tata kelola dan pelestarian memori institusional. Oleh karena itu, literasi perlu diposisikan sebagai kapabilitas strategis yang terintegrasi dalam praktik kerja pegawai non-arsiparis, bukan sebagai keterampilan tambahan yang bersifat opsional (Zhang & Thotham, 2024).

Dalam praktik organisasi, literasi sebagai kapabilitas strategis berkaitan erat dengan cara institusi merancang sistem kerja, mendistribusikan peran, dan membangun mekanisme akuntabilitas dalam pengelolaan informasi dan arsip. Ketika literasi dipahami semata sebagai keterampilan individual, tanggung jawab pengelolaan arsip cenderung dibebankan pada individu tanpa dukungan struktural yang memadai. Sebaliknya, dalam kerangka model literasi informasi dan kearsipan berkelanjutan yang dikembangkan dalam kajian ini, literasi diposisikan sebagai kapabilitas strategis organisasi yang terintegrasi ke dalam pengaturan peran kerja, alur proses, serta dukungan kelembagaan. Pendekatan ini menegaskan bahwa penguatan literasi tidak hanya berorientasi pada peningkatan kompetensi individu, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme institusional untuk merespons ketimpangan kapasitas, kompleksitas sistem digital, dan distribusi peran dalam pengelolaan arsip. Dengan demikian, literasi berperan sebagai penghubung antara aktor non-arsiparis, sistem informasi, dan tata kelola organisasi dalam mendukung keberlanjutan pengelolaan arsip institusional.

Ketimpangan SDM Kearsipan

Dalam banyak institusi publik dan pendidikan tinggi, pengelolaan arsip berlangsung di tengah ketimpangan yang nyata antara kebutuhan pengelolaan arsip yang semakin kompleks dan ketersediaan arsiparis yang terbatas. Ketimpangan ini tidak hanya berkaitan dengan jumlah tenaga arsiparis, tetapi juga dengan distribusi peran dan tanggung jawab kearsipan di tingkat organisasi. Akibat keterbatasan tersebut, sebagian besar aktivitas penciptaan, penyimpanan, dan pemanfaatan arsip secara operasional dijalankan oleh pegawai non-arsiparis yang secara struktural berada paling dekat dengan proses administrasi dan layanan institusional (Mosweu, 2019).

Ketimpangan sumber daya manusia kearsipan bersifat sistemik dan mencerminkan persoalan tata kelola organisasi. Arsiparis sering kali memegang tanggung jawab lintas unit atau fungsi pengawasan, sementara praktik pengelolaan arsip sehari-hari berlangsung di unit kerja tanpa pendampingan profesional yang memadai. Keterbatasan kapasitas pendidikan dan pengembangan kompetensi kearsipan memperkuat kesenjangan antara tuntutan pengelolaan arsip digital dan kesiapan sumber daya manusia yang tersedia, sehingga pengelolaan arsip berjalan secara parsial dan tidak seragam di berbagai bagian organisasi (Ngoepe, Jacobs, & Mojapelo, 2024).

Ketergantungan struktural terhadap pegawai non-arsiparis memiliki implikasi langsung terhadap kualitas tata kelola arsip. Integrasi pengelolaan arsip dalam lingkungan kerja yang kompleks menuntut pemahaman sosioteknis yang memadai. Ketika pengelolaan arsip dilakukan oleh aktor yang tidak dibekali kompetensi dan dukungan yang sesuai, praktik kearsipan cenderung bersifat reaktif, berorientasi jangka pendek, dan mengikuti kebutuhan administratif sesaat. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi melemahkan fungsi arsip sebagai dasar akuntabilitas, koordinasi kerja, dan pengambilan keputusan institusional (Jones & Vines, 2016).

Persoalan ketimpangan tersebut semakin mengemuka dalam konteks digitalisasi organisasi. Transformasi digital memperluas keterhubungan sistem informasi lintas unit dan meningkatkan ketergantungan pada konsistensi data, metadata, serta prosedur pengelolaan arsip. Perubahan organisasi berbasis teknologi tidak hanya memengaruhi sistem kerja, tetapi juga menuntut penyesuaian peran, kompetensi, dan relasi tanggung jawab. Dalam situasi ketimpangan SDM kearsipan, kesenjangan ini berisiko menghasilkan praktik pengelolaan arsip yang tidak sinkron dengan sistem informasi organisasi secara keseluruhan (Carlson, 1999).

Pengalaman lintas organisasi menunjukkan bahwa ketimpangan SDM kearsipan berdampak pada kemampuan institusi dalam mengelola arsip di luar batas unit atau struktur formal. Pengelolaan arsip lintas batas organisasi memerlukan koordinasi, standarisasi, dan kapasitas aktor yang memadai. Ketika kapasitas tersebut tidak merata, integrasi sistem dan keberlanjutan pengelolaan arsip menjadi sulit dicapai. Hal ini menegaskan bahwa ketimpangan SDM bukan hanya persoalan internal unit kerja, tetapi juga memengaruhi kemampuan institusi dalam membangun tata kelola informasi yang terintegrasi (Maroye et al., 2017).

Dalam kerangka yang lebih konseptual, ketimpangan SDM kearsipan berkaitan erat dengan persoalan *agency* dalam praktik pengelolaan arsip. Pengelolaan arsip melibatkan aktor dengan tingkat otoritas dan kapasitas yang berbeda, di mana *agency* menentukan sejauh mana individu dapat berpartisipasi secara bermakna dalam proses penciptaan dan pengelolaan arsip. Dalam konteks ketimpangan SDM, pegawai non-arsiparis kerap menjalankan fungsi kearsipan tanpa otoritas, dukungan, dan pengakuan yang memadai, sehingga *agency* mereka bersifat terbatas dan situasional (Rolan, 2017).

Di Indonesia, kondisi ketimpangan SDM kearsipan juga tercermin dalam konteks empiris nasional. Kapasitas pengelolaan arsip masih menghadapi tantangan serius terkait ketersediaan dan pemerataan sumber daya manusia kearsipan, yang berdampak langsung pada kualitas tata kelola arsip di berbagai lembaga publik. Temuan ini memperkuat argumen bahwa ketimpangan SDM bukan sekadar persoalan teknis, melainkan isu struktural yang memengaruhi keberlanjutan tata kelola arsip institusional (Arsip Nasional Republik Indonesia, 2023).

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa ketimpangan sumber daya manusia kearsipan merupakan persoalan struktural yang membentuk praktik pengelolaan arsip di tingkat institusi. Ketergantungan terhadap pegawai non-arsiparis, keterbatasan kapasitas profesional, dan kompleksitas lingkungan digital menciptakan kondisi di mana pengelolaan arsip dijalankan secara situasional dan tidak selalu terintegrasi. Dalam konteks tersebut, penguatan tata kelola arsip tidak dapat dilepaskan dari pemahaman terhadap peran aktor, keterbatasan struktural, dan kebutuhan akan mekanisme yang mampu menjembatani praktik kerja dengan prinsip kearsipan. Kesimpulan ini menjadi dasar bagi perumusan

sintesis integratif dan pengembangan model literasi informasi dan kearsipan berkelanjutan pada bagian berikutnya.

Sintesis Integratif dan Model Literasi Berkelanjutan

Perubahan dalam tata kelola kearsipan institusional menunjukkan bahwa pengelolaan arsip tidak lagi dapat dipahami sebagai fungsi teknis yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari dinamika organisasi dan sistem kerja digital. Integrasi arsip ke dalam proses administrasi sehari-hari menjadikan keterlibatan pegawai non-arsiparis sebagai keniscayaan struktural, terutama dalam kondisi keterbatasan jumlah arsiparis. Situasi ini menegaskan bahwa kualitas tata kelola arsip ditentukan oleh relasi antara aktor, praktik kerja, dan konteks organisasi, bukan semata oleh kepatuhan prosedural (Tansey, 2015; Rolan, 2017).

Dalam konteks tersebut, literasi informasi dan kearsipan berperan sebagai kapabilitas penghubung yang memungkinkan pegawai non-arsiparis memahami konteks institusional arsip, prinsip keandalan dan autentisitas, serta implikasi pengelolaan arsip digital dalam praktik kerja sehari-hari. Literasi tidak lagi dipahami sebagai keterampilan teknis individual, melainkan sebagai praktik sosial yang memengaruhi cara arsip dimaknai, digunakan, dan dipertanggungjawabkan dalam organisasi. Dengan demikian, literasi menjadi mekanisme kunci dalam menjaga kualitas arsip di tengah kompleksitas sistem digital dan tuntutan akuntabilitas institusional (Lloyd, 2012; Frings-Hessami, 2024).

Namun, literasi tidak dapat diposisikan sebagai substitusi atas peran arsiparis profesional. Dalam konteks ketimpangan sumber daya manusia kearsipan, literasi berfungsi sebagai mekanisme adaptif dan transisional yang bekerja di dalam keterbatasan struktural institusi. Oleh karena itu, artikel ini mengusulkan model literasi informasi dan kearsipan berkelanjutan untuk menjelaskan relasi antara peran pegawai non-arsiparis, kapabilitas literasi, dan kondisi kelembagaan secara terpadu. Kerangka konseptual ini disajikan pada Gambar 1 sebagai dasar pemahaman tata kelola arsip yang adaptif, akuntabel, dan relevan dengan tuntutan *Society 5.0* (Tansey, 2015; Ngoepe dkk., 2024).



Gambar 1. Model Integratif Literasi Informasi dan Kearsipan Berkelanjutan

Penjelasan Model dan Kontribusi Konseptual

Berdasarkan model literasi informasi dan kearsipan berkelanjutan yang disajikan pada Gambar 1, literasi dipahami sebagai mekanisme penghubung antara pegawai non-arsiparis, sistem teknologi, dan konteks kelembagaan dalam pengelolaan arsip institusional. Model ini menempatkan pegawai non-arsiparis sebagai aktor operasional kunci pada tahap awal siklus hidup arsip, sehingga kualitas arsip tidak semata ditentukan oleh struktur formal kearsipan, melainkan oleh kapasitas reflektif aktor yang terlibat langsung dalam praktik dokumentasi sehari-hari. Penempatan tersebut merepresentasikan kontribusi konseptual utama model, yakni pergeseran fokus analisis kearsipan dari dominasi struktur profesional menuju praktik kerja aktual yang secara faktual membentuk arsip sejak tahap penciptaan.

Dalam kerangka tersebut, literasi informasi dan kearsipan diposisikan sebagai kapabilitas inti yang memungkinkan pegawai non-arsiparis menjalankan fungsi kearsipan secara sadar, konsisten, dan bertanggung jawab. Literasi tidak dipahami sebagai keterampilan teknis individual atau pelengkap prosedural, melainkan sebagai fondasi reflektif yang menjaga keterhubungan antara arsip, konteks penciptaan, dan tujuan institusional. Dengan demikian, model ini berkontribusi pada pengayaan perspektif

kearsipan dengan menempatkan literasi sebagai prasyarat konseptual bagi keandalan arsip dalam mendukung pengambilan keputusan, akuntabilitas, dan keberlanjutan memori organisasi.

Model ini juga menegaskan bahwa literasi tidak bekerja secara terisolasi, melainkan selalu beroperasi dalam konteks struktural kelembagaan. Keterbatasan jumlah arsiparis, kompleksitas sistem digital, serta meningkatnya tuntutan akuntabilitas membentuk ruang operasional tempat literasi diaktualisasikan dalam praktik kerja. Dalam kondisi tersebut, literasi berfungsi sebagai mekanisme adaptif dan transisional yang memungkinkan institusi menjaga kualitas tata kelola arsip di tengah keterbatasan sumber daya manusia. Posisi ini menegaskan bahwa literasi bersifat komplementer, bukan substitutif, terhadap peran arsiparis, sekaligus menjelaskan mengapa penguatan literasi menjadi kebutuhan mendesak dalam tata kelola arsip kontemporer.

Secara keseluruhan, integrasi antara peran pegawai non-arsiparis, kapabilitas literasi informasi dan kearsipan, serta konteks kelembagaan dalam satu kerangka konseptual memungkinkan pembacaan tata kelola arsip yang lebih holistik dan kontekstual. Model yang dikembangkan dalam artikel ini tidak dimaksudkan sebagai panduan implementatif yang bersifat preskriptif, melainkan sebagai kerangka analitis untuk memahami relasi antara praktik kearsipan sehari-hari dan tuntutan tata kelola institusional dalam era transformasi digital dan *Society 5.0*. Dengan demikian, kontribusi utama artikel ini terletak pada penyediaan landasan konseptual untuk memahami keberlanjutan tata kelola arsip di tengah ketimpangan struktural dan kompleksitas sistem informasi modern.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Transformasi menuju era *Society 5.0* telah mengubah pengelolaan informasi dan kearsipan dari aktivitas administratif konvensional menjadi praktik strategis yang terintegrasi dengan sistem digital dan nilai-nilai humanistik. Dalam berbagai institusi dan organisasi, keterlibatan pegawai non-arsiparis dalam pengelolaan arsip merupakan realitas struktural yang tidak terelakkan. Namun, keterlibatan tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan literasi informasi dan kearsipan yang memadai, sehingga berpotensi melemahkan akuntabilitas informasi, efisiensi kerja, dan keberlanjutan dokumentasi institusional.

Artikel ini menegaskan bahwa literasi informasi dan kearsipan merupakan fondasi konseptual dalam menjaga kualitas tata kelola arsip di tengah keterbatasan jumlah arsiparis dan meningkatnya kompleksitas sistem digital. Literasi tidak dapat dipahami sebagai keterampilan teknis individual, melainkan sebagai kapabilitas strategis yang bekerja dalam relasi antara pegawai non-arsiparis sebagai aktor kunci dalam praktik kearsipan, sistem teknologi, dan konteks kelembagaan. Melalui pengembangan model literasi informasi dan kearsipan berkelanjutan, artikel ini menunjukkan bahwa penguatan literasi merupakan prasyarat bagi tata kelola arsip yang adaptif, akuntabel, dan relevan dengan tuntutan *Society 5.0*.

Berdasarkan temuan konseptual dan sintesis pembahasan, beberapa rekomendasi berikut dapat dipertimbangkan oleh pimpinan institusi dan pemangku kepentingan terkait tata kelola arsip:

1. Penguatan literasi berbasis peran, melalui pengembangan program literasi informasi dan kearsipan yang terstruktur dan berjenjang, dengan penyesuaian konten berdasarkan karakteristik tugas dan tanggung jawab pegawai non-arsiparis.
2. Integrasi literasi dalam tata kelola kerja, dengan memasukkan prinsip-prinsip kearsipan ke dalam SOP unit kerja agar praktik pengelolaan arsip selaras dengan prinsip keteraturan, akuntabilitas, dan keberlanjutan dokumentasi.
3. Pendekatan kolaboratif kelembagaan, melalui keterlibatan lintas unit, arsiparis, SDM, TIK, dan pimpinan lembaga dalam perancangan, implementasi, dan evaluasi strategi penguatan literasi secara berkelanjutan.
4. Pengakuan institusional terhadap praktik literasi, dengan menjadikan kompetensi pengelolaan arsip sebagai bagian dari penilaian kinerja dan pengembangan profesional pegawai non-arsiparis.

Melalui penerapan rekomendasi tersebut, institusi diharapkan mampu memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola informasi secara bertanggung jawab, sekaligus membangun ketahanan dokumentasi institusional yang mendukung tata kelola organisasi yang adaptif dan berkelanjutan di era *Society 5.0*.

DAFTAR PUSTAKA

- Akman, A., & Erdirençelebi, M. (2024). A Human-Centered Digital Transformation: A Bibliometric Analysis of *Society 5.0* and Industry 5.0. *Istanbul Management Journal*, 0(96), 1–16. <https://doi.org/10.26650/imj.2024.96.1361480>
- Arsip Nasional Republik Indonesia. (2023). Laporan Kinerja Kearsipan Nasional Tahun 2023. In *Lembaran Negara Republik Indonesia*.
- Baines, J. (2023). Establishing special collections literacy for undergraduate students: an investigation into benefits and barriers of access. *Archives and Records*, 44(1), 8–35. <https://doi.org/10.1080/23257962.2022.2149481>
- Carayannis, E. G., & Morawska-Jancelewicz, J. (2022). The Futures of Europe: *Society 5.0* and Industry 5.0 as Driving Forces of Future Universities. *Journal of the Knowledge Economy*, 13(4), 3445–3471. <https://doi.org/10.1007/s13132-021-00854-2>
- Carini, P. (2015). *Information Literacy for Archives and Special Collections: Information Literacy for Archives and Special Collections: Defining Outcomes Defining Outcomes*. <https://digitalcommons.dartmouth.edu/dlstaffpubs>
- Carlson, P. (1999). Information Technology and Organizational Change. *SIGDOC '99: Proceedings of the 17th Annual International Conference on Computer Documentation*, 26. <https://doi.org/10.1145/318372.318389>
- Cuevas-Cerveró, A., Colmenero-Ruiz, M. J., & Martínez-Ávila, D. (2023). Critical information literacy as a form of information activism. *Journal of Academic Librarianship*, 49(6). <https://doi.org/10.1016/j.acalib.2023.102786>
- Frings-Hessami, V. (2024). Motivations for personal recordkeeping practices: the roles of personal factors, recordkeeping literacy and the affordances of records. *Archival Science*, 24(1), 83–99. <https://doi.org/10.1007/s10502-023-09431-9>
- Hellmer, E. (2023). *It is a Matter of Perspectives A Literature Review of Users and Use in an Archival Context*. 4(2), 2023.
- Jones, M., & Vines, R. (2016). *Cultivating Capability: The socio-technical challenges of integrating approaches to records and knowledge management*.
- Lloyd, A. (2012). Information literacy as a socially enacted practice: Sensitising themes for an emerging perspective of people-in-practice. *Journal of Documentation*, 68(6), 772–783. <https://doi.org/10.1108/00220411211277037>
- Maroye, L., van Hooland, S., Aranguren Celorrio, F., Soyeze, S., Losdyck, B., Vanreck, O., & de Terwangne, C. (2017). Managing electronic records across organizational boundaries: The experience of the Belgian federal government in automating investigation processes. *Records Management Journal*, 27(1), 69–83. <https://doi.org/10.1108/RMJ-11-2015-0037>
- Micheli, M., Scholten, H., Craglia, M., & Lloyd, P. (2020). Competences and Skills in the Governance of a Digitally Transformed Society. *Fifth Workshop of the DigiTranScope Project*, JRC119268. <https://ec.europa.eu/jrc>
- Mosweu, O. (2019). Knowledge and skills requirements for a records manager in Botswana in the networked environment. *Journal of the South African Society of Archivists*, 52(0), 110–132. <https://doi.org/10.4314/jsasa.v52i0>
- Netshakhuma, N. S. (2020). *The Future of Archivists and Records Managers in Mpumalanga, South Africa*. 37. <https://doi.org/10.25159/0027-2639/6796>
- Ngoepe, M., Jacobs, L., & Mojaelo, M. (2024). Inclusion of digital records in the archives and records management curricula in a comprehensive open distance e-learning environment. *Information Development*, 40(2), 190–201. <https://doi.org/10.1177/02666669221081812>
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. In *Lembaran Negara Republik Indonesia* (43). Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Rojas, C. N., Peñafiel, G. A. A., Buitrago, D. F. L., & Romero, C. A. T. (2021). *Society 5.0: A Japanese concept for a superintelligent society*. *Sustainability*, 13(12), 1–16. <https://doi.org/10.3390/su13126567>
- Rolan, G. (2017). Agency in the archive: a model for participatory recordkeeping. *Archival Science*, 17(3), 195–225. <https://doi.org/10.1007/s10502-016-9267-7>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Sumarti, T. (2023). *Employee Archives Management in the Process of Archive Return to Support the Promotion Process* (pp. 1435–1447). https://doi.org/10.2991/978-2-38476-008-4_155
- Tansey, E. (2015). Archives Without Archivists. *Reconstruction: Studies in Contemporary Culture*, 16(1).

- Torraco, R. J. (2016). Writing Integrative Literature Reviews: Using the Past and Present to Explore the Future. *Human Resource Development Review*, 15(4), 404–428. <https://doi.org/10.1177/1534484316671606>
- Torres, M. (2018). *Archival Digitization for Non-Professionals* [Master Thesis]. Ryerson University.
- Vassilakaki, E., & Moniarou-Papaconstantinou, V. (2017). Beyond preservation: investigating the roles of archivist. *Library Review*, 66(3), 110–126. <https://doi.org/10.1108/LR-09-2016-0077>
- Vilar, P., Šauperl, A., Semlič Rajh, Z., Robinson, L., & Bawden, D. (2016). *Information competencies of historians as archive users: A Slovenia/UK comparison*.
- Yakel, E., & Bost, L. L. (1994). Understanding Administrative Use and Users in University Archives. In *American Archivist* (Vol. 57). http://meridian.allenpress.com/american-archivist/article-pdf/57/4/596/2748713/aarc_57_4_60283463162m4242.pdf
- Zhang, Z., & Thotham, A. (2024). Literacy Strategies for the Preservation and Contemporary Development of Chinese Luoyang Quju Opera. *International Journal of Education and Literacy Studies*, 12(3), 180–186. <https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.12n.3p.180>